

Tambun Utara)”.¹² Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pola alih fungsi lahan pertanian yang terjadi diawali dengan alih kekuasaan lahan dari petani kepada pihak lain. Petani menjual lahan pertanian kepada para investor dan kemudian dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri. Adapun yang menjadi faktor utama banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi karena kepemilikan lahan dari petani yang dijual kepada para investor. Adapun latar belakang penjualan tersebut karena jumlah tanggungan petani lebih tinggi daripada proporsi pendapatan usaha tani.

Selain itu juga terdapat skripsi yang ditulis Amrisal pada tahun 2013 yang dituangkan dalam sebuah jurnal berjudul “Tahapan Konflik Agraria antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Studi: Konflik Masyarakat Nagari Abai dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha PT. Ranah Andalas Plantation)”¹³. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya kepincangan diantara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah setempat menyerahkan tanah masyarakat kepada pihak investor agar terjalin kerjasama antara pemerintah dengan pemilik modal. Namun hal ini mendapat penolakan dari masyarakat karena kerjasama investasi yang dilakukan tidak memiliki kesepakatan yang jelas. Dalam kerjasama tersebut investor hanya memberikan ganti rugi tanah masyarakat yang digunakan. Masyarakat mencoba untuk

¹² Muhamad Dika Yudhistira, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)*, (Skripsi: Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor), 2013.

¹³ Amrisal, *Tahapan Konflik Agraria antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Studi: Konflik Masyarakat Nagari Abai dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha PT. Ranah Andalas Plantation)*, (Skripsi: Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang), 2013.

menuntut pemerintah agar tidak memberikan izin kepada para investor untuk mendirikan perusahaan di dekat pemukiman warga karena akan berdampak pada lingkungan. Namun pemerintah malah memberikan perizinan kepada investor untuk memperoleh hak atas tanah dan membiarkan masyarakat kehilangan tanah mereka.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, pembahasan yang ada hanya terkait masalah konflik lahan dan tidak menyentuh ke arah politik agraria secara menyeluruh. Misal penelitian yang dilakukan oleh Fransiscus, yang membahas negara vs masyarakat yang mana di dalam pembahasannya hanya melihat bahwa terdapat kesalahan pengaturan penggunaan tanah yang banyak menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Penyebab banyaknya penyimpangan tersebut karena kepentingan yang ada. Sayangnya, dalam penelitian itu tidak menyentuh bagaimana dan seperti apa seharusnya sikap pemerintah dalam mempertahankan tanah yang ada.

Penelitian ini membahas lebih mendalam tentang masalah agraria khususnya masalah tanah dengan melihat beberapa poin yang penting dalam agraria, yakni politik agraria. Bagaimana politik agraria menjadi hal yang paling dominan dalam ketersediaan dan ketercukupan pangan. Penelitian ini juga mengkaitkan relasi antara negara dan masyarakat dalam politik agraria, bagaimana hubungan antara keduanya harus terjalin demi terealisasinya program politik agraria. Sehingga dalam penelitian ini akan mendapatkan proses analisis yang berbeda dan akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru, dan belum pernah

